



Pemetaan Sebaran Penyandang Disabilitas Dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2024

Sinta Nur Faiamanila Najwa, Bambang Agus Herlambang, Ahmad Khoirul Anam

Universitas PGRI Semarang

Program Studi Informatika

sintanurfiamanila@gmail.com, bambangherlambang@upgris.ac.id, karir.anam@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis sebaran populasi penyandang disabilitas (PD) serta lokasi sekolah khusus di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, agar dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan aksesibilitas dalam pendidikan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat perbedaan dalam sebaran PD antar desa dan kelurahan. Untuk membandingkan titik konsentrasi PD dengan lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB), termasuk SLB Negeri Rembang dan SLB Negeri Lasem yang baru, digunakan metode pemetaan geospasial. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa wilayah dengan jumlah PD yang tinggi, namun jarak tempuh ke fasilitas pendidikan terdekat masih jauh. Dari studi kasus ini, dapat dilihat bahwa pentingnya penggunaan data spasial dalam penyusunan kebijakan untuk merencanakan layanan pendidikan inklusif yang merata di Kabupaten Rembang.

Kata kunci: Pemetaan Geospasial, Penyandang Disabilitas, Akses Pendidikan, SLB, Kabupaten Rembang.

ABSTRACT. This study aims to map and analyze the distribution of people with disabilities (PD) and the locations of special education facilities in Rembang Regency, Central Java, in order to identify gaps in educational accessibility. Data from the 2024 BPS shows disparities in the spread of PD across villages and sub-districts. Geospatial mapping was used to compare the concentration points of PD with the locations of special schools, including newly established ones like SLB Negeri Rembang and SLB Negeri Lasem. The results indicate areas with a high concentration of PD but significant traveling distances to the nearest educational facilities. The implications of this case study highlight the importance of data-based spatial policies in planning inclusive education services that are evenly distributed across Rembang.

Keywords: Geospatial Mapping, People with Disabilities, Educational Access, Special Schools, Rembang Regency.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas (PD). UUD 1945 dan peraturan turunannya menjamin hak PD untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks layanan publik dan hak asasi manusia, tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup dan mudah dijangkau (aksesibilitas) menjadi tanda penting keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Rembang, sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah, menghadapi tantangan dalam memastikan pendidikan dapat diakses secara merata oleh PD. Meskipun telah ada upaya besar, seperti pembangunan gedung baru SLB Negeri Lasem dengan dana besar [1] pemahaman yang mendalam mengenai letak geografis PD dan fasilitas pendukungnya masih terbatas.

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman mengenai pemerataan akses pendidikan ini, studi kasus ini mengadopsi pendekatan geospasial yang terstruktur. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran desa/kelurahan berdasarkan keberadaan dan jumlah penyandang disabilitas (PD) menggunakan data

terbaru dari BPS Rembang (2024). Selanjutnya, pemetaan juga dilakukan terhadap lokasi fasilitas pendidikan khusus yang tersedia, seperti SLB Negeri Rembang dan SLB Negeri Lasem, untuk mengetahui sebaran fasilitas layanan [2].

Fokus utama analisis adalah menganalisis kesenjangan spasial (baik dalam bentuk jarak tempuh maupun area layanan) antara titik konsentrasi PD dengan lokasi sekolah. Hasil pemetaan dan analisis kesenjangan ini diharapkan dapat menjadi landasan faktual bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merumuskan kebijakan afirmatif dan merencanakan pembangunan sekolah inklusi atau penyediaan layanan transportasi khusus yang lebih tepat sasaran guna mencapai pemerataan akses pendidikan yang sesungguhnya.

Landasan hukum dan konsep ULD sebagai bagian dari pemenuhan hak PWD di sekolah. Poin ini penting karena temuan Anda adalah peta sebaran fasilitas; ULD adalah fasilitas non-fisik yang sangat penting. Data nasional dan penelitian di daerah lain seperti Kota Bandung menunjukkan bahwa persentase PWD yang mendapatkan kesempatan bersekolah masih tergolong rendah. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian pemetaan ini untuk memastikan tidak ada PWD di Kabupaten Rembang yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan [3].

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif-analitik dengan fokus pada analisis spasial (geospasial).

a. Data Primer:

Informasi lokasi koordinat (GPS) fasilitas pendidikan (SLB).

b. Data Sekunder:

- Data Sebaran Disabilitas: Jumlah desa/kelurahan menurut keberadaan menurut PD [4]
- Data Lokasi Fasilitas Pendidikan Khusus: Alamat dan informasi profil SLB Negeri Rembang dan SLB Negeri Lasem [1].
- Peta Administrasi: Peta batas desa atau kelurahan Kabupaten Rembang.

1.2 Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif: Mengolah data BPS untuk mengetahui desa atau kelurahan dengan jumlah PD terbanyak dan tersebar.

b. Analisis Geospasial:

- Digitasi dan Georeferensi: Data sebaran PD diinput ke dalam perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk dihubungkan dengan peta administrasi Rembang.
- Pemetaan Titik (Point Mapping): Lokasi SLB diplot sebagai titik layanan.
- Analisis Jarak (Proximity Analysis): Dilakukan analisis buffer atau perhitungan jarak terdekat (nearest neighbor analysis) antara pusat desa/kelurahan dengan konsentrasi PD tinggi ke lokasi SLB terdekat.
- Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): membandingkan wilayah yang berada di luar jangkauan ideal fasilitas pendidikan (misalnya, di luar radius 5-10 km) dengan jumlah populasi PD di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sebaran Penyandang Disabilitas (PD)

Berdasarkan data BPS (2024), penyebaran penyandang disabilitas (PD) di Kabupaten Rembang tidak merata. Ada beberapa wilayah kecamatan yang menunjukkan konsentrasi PD yang signifikan, sementara wilayah lainnya memiliki

jumlah yang relatif sedikit atau bahkan ada desa/kelurahan yang belum melaporkan keberadaan PD [4].

TABEL 16.3
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICT BY PRESENCE OF
DISABLED

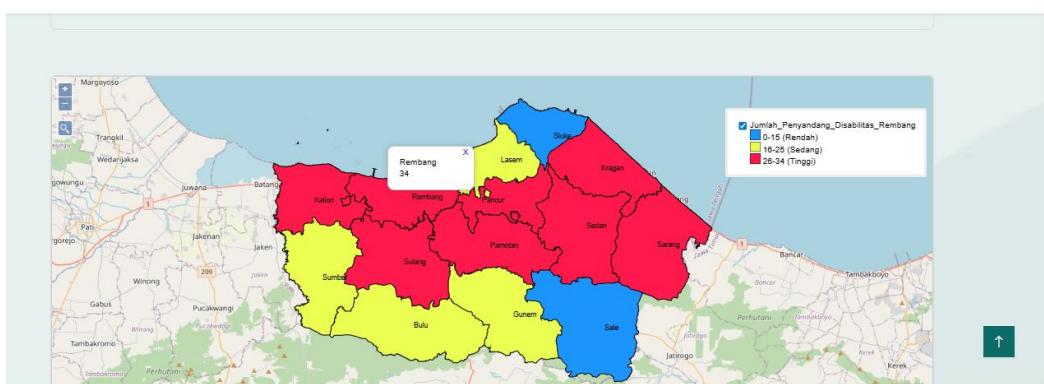
Kecamatan District	Ada Penyandang Disabilitas Disabled People	Jenis Disabilitas/The Type of Disability					Jenis Disabilitas/The Type of Disability				
		Tuna Netra Blind	Tuna Rungu Deaf	Tuna Wicara Mute	Tuna Rungu- Wicara Deaf-Mute	Tuna Daksa Physically Disable	Tuna Grahita Mental Disorder	Tuna Laras Post- Madness	Tuna Eks Sakit Kusta Post-Leprosy	Tuna Ganda Physical- Mental Disabilities	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sumber	18	8	8	9	6	11	13	8	1	2	
Bulu	16	8	4	6	6	11	8	12	2	3	
Gunem	16	6	7	8	6	10	13	13	2	3	
Sale	15	10	8	9	7	12	12	9	4	2	
Sarang	23	16	11	12	15	15	19	14	8	1	
Sedan	21	13	13	11	14	14	18	14	4	3	
Pamotan	23	15	5	13	5	20	20	13	4	3	
Sulang	21	10	10	10	10	16	14	15	4	-	
Kaliiori	23	10	10	8	12	18	20	12	2	2	
Rembang	34	19	12	14	15	22	31	19	2	1	
Pancur	22	12	9	13	11	16	13	14	-	1	
Kragan	27	20	20	21	8	18	22	16	3	1	
Sluke	13	6	6	9	9	8	10	8	-	1	
Lasem	20	11	7	8	12	14	16	15	1	2	
REMBANG	292	164	130	151	136	205	229	182	37	25	

Sumber : Data Potensi Desa 2024

Menyediakan data dasar berupa angka yang menjelaskan desa mana yang memiliki atau tidak memiliki PD, sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat peta.

Sistem Informasi Geografis
Sebaran Penyandang Disabilitas dan
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang

Beranda Informasi Statistik



3.2 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Khusus Fasilitas pendidikan khusus utama di Rembang, mencakup:

- SLB Negeri Rembang: Terletak di wilayah Rembang, bukan di kota atau sekitarnya [2].
- SLB Negeri Lasem: Terletak di Lasem, yang baru saja mendapat gedung baru dengan dana besar [1], berpotensi melayani wilayah timur Rembang.

Pemetaan Sebaran Penyandang Disabilitas Dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2024

Meskipun dua SLB ini penting, Rembang memiliki 14 kecamatan. Dua fasilitas ini mungkin belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah secara efektif, terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (PD) yang memerlukan perhatian intensif dan tidak bisa belajar di sekolah inklusi umum.

Nama Sekolah	Jenis Layanan	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus	Sarana Pendukung
SLB Negeri Rembang	SLB	Rembang	SDLB, SMPLB, SMLB	Ruang kelas khusus, akses kursi roda
SLB Negeri Lasem	SLB	Lasem	±150 siswa (tunadaksa dsb)	Fasilitas pembelajaran khusus, renovasi
SDN Sukoharjo	Inklusi	Rembang	Tercatat peserta didik khusus	Sarana umum, ramah disabilitas
SD Katolik Santa Maria	Inklusi	Rembang	Tercatat peserta didik khusus	Sarana umum, ramah disabilitas
SDN Magersari	Inklusi	Rembang	Tercatat peserta didik khusus	Sarana umum, ramah disabilitas
SDN 2 Leteh	Inklusi	Rembang	Tercatat peserta didik khusus	Sarana umum, ramah disabilitas
SMK Al-Mubaarak	Inklusi	Rembang	Tercatat peserta didik khusus	Sarana umum, ramah disabilitas

3.3 Analisis Kesenjangan Spasial Hasil analisis geospasial menunjukkan bahwa: Wilayah Timur vs. Barat:

Pembangunan SLB Negeri Lasem telah meningkatkan akses di wilayah Rembang timur. Namun, wilayah Rembang barat atau selatan yang jauh dari pusat kota Rembang dan Lasem, seperti Kecamatan Sale atau Sumber, masih menghadapi tantangan aksesibilitas yang besar. Jarak Tempuh Kritis: Beberapa desa dengan populasi PD yang tinggi [4], berada lebih dari 15 km dari SLB terdekat. Jarak ini menjadi hambatan besar, terutama karena keterbatasan mobilitas yang dihadapi PD dan kendala biaya transportasi harian [5].

Rekomendasi Buffer: Analisis zona jangkauan 10 km dari lokasi SLB menunjukkan bahwa sebagian besar PD berada di luar jangkauan optimal, yang mengindikasikan perlunya pengembangan layanan alternatif, seperti:

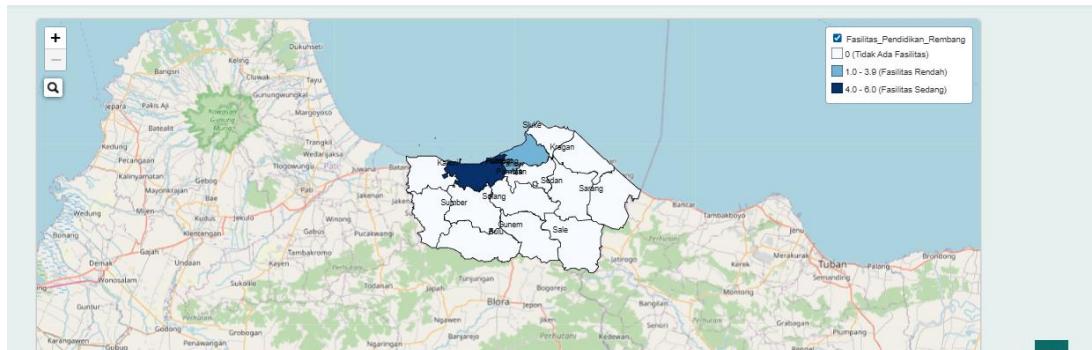
- a. Membuka unit layanan di sekolah inklusi yang lebih dekat
- b. Menyediakan layanan antar-jemput khusus. Kesenjangan spasial ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik sekolah harus diimbangi dengan pemahaman akan kebutuhan di lapangan agar dana besar, seperti pembangunan SLB Lasem, dapat memberikan dampak maksimal terhadap pemerataan akses.

Kesenjangan spasial ini semakin buruk karena ada beberapa masalah dalam penerapannya, seperti dijelaskan dalam studi kasus lainnya (misalnya di Kabupaten Magelang), yaitu kurangnya guru pendamping khusus dan kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Selain kemudahan akses fisik seperti ramp dan toilet khusus, kemudahan dalam berkomunikasi juga sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas pendengaran. Ketersediaan

pendidik yang menguasai bahasa isyarat atau sistem bantuan komunikasi, seperti yang dijelaskan oleh [6], seharusnya menjadi bagian dari penilaian fasilitas di Kabupaten Rembang.

Sistem Informasi Geografis Sebaran Penyandang Disabilitas dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang

Beranda Informasi Statistik



Sistem Informasi Geografis Sebaran Penyandang Disabilitas dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang

Beranda Informasi Statistik



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi kasus pemetaan sebaran penyandang disabilitas dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Rembang menunjukkan adanya kesenjangan spasial yang signifikan dalam akses pendidikan khusus. Initial formulation mencakup semua fungsi yang terdeskripsikan dalam dokumen Spesifikasi Persyaratan Sistem (SRS), sedangkan final formulation mencakup semua fungsi yang terdeskripsikan dalam dokumen SRS tetapi dengan kemungkinan penambahan atau perubahan yang dilakukan selama PD. Wilayah dengan penyandang disabilitas yang tersebar jauh dari pusat layanan merupakan area prioritas yang memerlukan intervensi kebijakan.

Saran

Berdasarkan temuan mengenai kesenjangan spasial yang signifikan, Pemerintah Kabupaten Rembang dianjurkan untuk segera merumuskan kebijakan yang responsif terhadap data geospasial. Kebijakan berbasis SIG harus diutamakan, yaitu mengandung seluruh fungsi yang tercantum dalam dokumen Spesifikasi Persyaratan Sistem (SRS).

Sementara itu, kebijakan final meliputi semua fungsi yang terdapat dalam SRS, tetapi dengan kemungkinan penambahan atau perubahan yang dilakukan selama proses pengembangan baru atau penambahan Unit Layanan Pendidikan Khusus (ULPK) di sekolah umum yang sudah ada. Mengingat keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada, penguatan Sekolah Inklusi menjadi prioritas kedua, yakni melalui peningkatan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru di sekolah umum yang berada di wilayah dengan konsentrasi PD yang tinggi, sehingga dapat memastikan kualitas layanan pendidikan khusus terpenuhi secara lokal.

Terakhir, untuk mengatasi hambatan akses yang diakibatkan oleh jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan mobilitas, perlu dipertimbangkan implementasi Program Transportasi Khusus. Program ini dapat berupa subsidi atau penyediaan layanan antar-jemput yang terstruktur bagi PD yang tinggal di desa-desa terpencil, sehingga aksesibilitas pendidikan dapat dijamin, tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas, tetapi juga dari kemudahan aktual dalam mencapai sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] r2brembang.com, “Telan Biaya 7 Miliar, SLB Negeri Lasem Punya Gedung Sekolah Baru,” <https://r2brembang.com/2024/12/19/telan-biaya-7-miliar-slb-negeri-lasem-punya-gedung-sekolah-baru/>, 2024.
- [2] idalamat.com, “SLB Negeri Rembang Rembang Jawa Tengah,” <https://idalamat.com/alamat/430818/slb-negeri-rembang-rembang-jawa-tengah>.
- [3] A. D. Islam, F. Timorochmadi, M. Y. Fakhrudin, R. Yosepty, T. Ratnawulan, and N. S. Rahayu, “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung,” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, pp. 362–377, Jan. 2024, doi: 10.47668/pkwu.v12i1.1175.
- [4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Disabilitas*. 2024.
- [5] Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Fasilitasi Difabel: Ganjar Resmikan SLB Negeri Rembang,” https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9300.
- [6] I. Sari and E. Altiarika, “Sistem Pengembangan Bahasa Isyarat Untuk Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas (Tunarungu),” 2023. [Online]. Available: <https://jits.unmuhabbel.ac.id/document/1>.
- [7] R. Umar, H. Lahaling, and R. Rasmulyadi, “Volume 12 Nomor 2 Februari 2025 Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif.”
- [8] “2071201043_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA”.